



ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK PREVENTIF INDONESIA MENGHADAPI KRISIS ENERGI TAHUN 2021

Analysis of Preventive Political Economy Policy Strategy in Indonesia Facing Energy Crisis in 2021

Nefriwanti Lumembang, Abdul Hafid

Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sulawesi Barat

Email: abdulhafidtahir@unsulbar.ac.id

ABSTRACT

The global energy crisis is an increase in energy needs during the economic recovery period, where at the same time, part of the energy infrastructure is being sorted but there are obstacles due to an infectious pandemic. This research is a type of descriptive research. This research plays a role in examining, parsing and analyzing the relationship between concepts and facts in explaining the political economic policy strategy adopted by the Indonesian government as a preventive measure for the 2021 energy crisis. The concept of energy security is very crucial for Indonesia at this time. Where the Indonesian government has implemented several policies to strengthen its national energy security by developing an energy policy that is based on needs, reducing petroleum subsidies to a minimum, renewing energy policy so that it can strengthen the governance of the national energy sector and strengthening the legislative and policy framework for energy verification using development EBT (Renewable Energy). Downstreaming is one of the strategies implemented by Indonesia to increase the selling value of commodities, strengthen the industrial structure, provide more employment opportunities, and also increase domestic business opportunities. By carrying out downstreaming, in the future the commodities exported will no longer be raw materials, but will be semi-finished goods or goods that are ready to be used. Selling or exporting goods in semi-finished or ready-to-use form will automatically increase selling value, especially for Indonesia.

Keywords: *Indonesia, crisis, energy security, strategy*

ABSTRAK

Krisis energi global adalah adanya peningkatan keperluan energi dalam masa pemulihan ekonomi, dimana pada saat yang bersamaan, sebagian infrastruktur energi tengah dipilah tetapi terjadi hambatan karena pandemic yang menular. Penelitian ini berupa jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berperan untuk menelaah, mengurai dan menganalisis hubungan antara konsep dan fakta dalam menjelaskan bagaimanakah strategi kebijakan ekonomi politik yang ditempuh pemerintah Indonesia sebagai langkah preventif atas krisis energi tahun 2021. Konsep ketahanan energi menjadi sangat krusial bagi Indonesia pada saat ini. Dimana pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi nasionalnya dengan mengembangkan kebijakan energi yang bertumpu pada kebutuhan, menekan subsidi minyak bumi seminimal mungkin, pembaharuan kebijakan energi agar bisa memperkuat tata kelola sektor energi nasional serta memperkuat kerangka legislasi dan kebijakan diverifikasi energi dengan menggunakan pengembangan EBT (Energi Terbarukan). Hirilisasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, juga meningkatkan peluang usaha dalam negeri. Dengan melakukan hirilisasi, pada masa mendatang komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, namun berupa barang setengah jadi atau barang yang sudah siap di pakai. Menjual atau mengekspor barang dalam bentuk setengah jadi ataupun yang siap pakai secara otomatis akan menambah nilai jual terutama bagi Indonesia.



Kata Kunci: **Indonesia, krisis, ketahanan energi, strategi**
PENDAHULUAN

Krisis energi merupakan peristiwa adanya gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut *Collinsdictionary* krisis energi bisa juga diartikan karena kurangnya bekal sumber daya energi atau kenaikan akan harga sumber daya, seperti minyak bumi¹. Terdapat tarif minyak dunia mengalami peningkatan sampai menghasilkan nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir juga harga batu bara naik 450% dalam satu tahun serta gas alam naik hingga US\$6 per MMBtu menurut media Indonesia tahun 2021. Isu ini yang mendatangkan krisis energi dunia pada tahun 2021, sehingga krisis ini banyak mengalihkan tempat negara-negara maju agar tidak berscepat menutup batu bara sebagaimana yang disampaikan secara tertulis COP26 dan dipublikasikan *BBC* tentang dokumen yang tiris.

Output tenaga angin yang jauh lebih rendah dari yang diinginkan menjadi salah satu alasan negara Eropa dan Inggris dilanda krisis energi. Eropa mendapatkan EBT dari dua sumber utama yakni tenaga angin dari laut utara yang merupakan tumpuan bagi negara Inggris, Jerman, dan Denmark, kemudian tenaga air yang juga menjadi tumpuan bagi Norwegia. Pada tahun 2021, kedua sumber tersebut mengalami kekeringan, karena angin tidak tertiuip juga tingginya air di Norwegia dan dampaknya juga diraskaan Amerika Selatan. Kemerosotan donasi tenaga angi yang awalnya 25% menjadi 7% dari bauran energi Eropa sepanjang tahun 2021².

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia menyampaikan mengenai harga batu bara sepanjang tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang tak tertandingi. Dalam hal ini produksi batu bara di anggap menjadi bahan bakar fosil paling menguntungkan selama tahun 2021 yang dibarengi dengan adanya krisis ekonomi yang pernah dilanda beberapa negara. Dalam situasi mengakibatkan supply energi dari beberapa negara maju yang berproses secara aktif. Tercatat pada 6 Januari 2021 menurut Bursa ICE Newcastle, tarif terendah produksi batu bara sebesar US\$76,35 per metrik ton dan tanggal 5 Oktober 2021 tingginya harga suply dunia sampai US\$272,5 per metrik ton dan tarif harga batu bara ini menjadi harga paling tertinggi sepanjang sejarah³.

Di antara komoditas-komoditas yang ada, yang paling krusial adalah batu bara, yang mana pada tahun 2021 menggambarkan harga batubara yang terus mengalami peningkatan dan siapapun tidak akan bisa memprediksikan sampai mana angka paling tinggi untuk batubara pada saat itu⁴. Sempat menurun harga dari batubara namun mengalami peningkatan pada bulan Juni 2022 yang awalnya 6% menjadi 1,16% dan menembus harga US\$400 per metrik ton. Adanya kenaikan harga disebabkan krisis listrik pada India sehingga mengalami supply pada komoditas batubara ini meningkat dimana beberapa waktu yang lalu India

¹Kristina.2021.Krisis Energi: Pengertian, Penyebab, dan Cara Mengatasinya. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5756087/krisis-energi-pengertian-penyebab-dan-cara-mengatasinya>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022. Pukul 10.00 am

² Bob S EFF Endi.2021. Analisis Krisis Energi Dunia 2021 dan Lesson Learned bagi Indonesia. Medisa Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/444518/analisis-krisis-energi-dunia-2021-dan-lesson-learned-bagi-indonesia>. Di akses pasa tanggal 30 Maret pukul 20.00pm

³ Rayful Mudassir.2021.Keleidoskop 2021 Krisis Energi 2021 Bikin Batu Bara Ketiban Untung. Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/44/1483945/kaleidoskop-2021-krisis-energi-2021-bikin-batu-bara-ketiban-untung>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 23.00 pm

⁴ Singgih Widagdo.2021.Batu Bara dan Krisis Energi Dunia.<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/14/batubara-dan-krisis-energi-dunia>. Diakses pada tanggal 2 April 2022 01.23 pm



mengalami suhu yang ekstrem dan menggunakan pendingin ruangan secara berlebihan dan mengakibatkan pemakaian listrik naik.⁵

Tidak mau tertandingi komoditas minyak juga mengalami peningkatan. Dimana nilai ekspor minyak sawit Indonesia sebanding dengan 9,88% dari jumlah ekspor non-migas Indonesia dalam 2 bulan pertama pada tahun 2022 yakni senilai US\$37,74 miliar. Pada awal tahun 2022 pun presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan ekspor minyak sawit agar bisa memenuhi penyediaan minyak goreng dengan biaya tercapai secara nasional. Namun, Direktur Eksekutif *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute* (PASPI) menyampaikan bahwa langkah dari strategi tersebut belum tentu akan memberikan penurunan pada tarif minyak goreng dalam negeri tetapi akan mengakibatkan ketimpangan antara biaya internasional dan nasional semakin naik⁶.

Terdapat beberapa negara yang terkena dampak krisis energi tahun 2021, pertama Singapura yang mengalami kenaikan biaya listrik sehingga mengakibatkan negara Singapura mengalami krisis energi dunia. Adanya harga produksi yang semakin naik, biaya hidup serta ekonomi negara secara menyeluruh. Penyebab utamanya ialah tarif gas alam yang sudah naik diakibatkan meningkatnya permintaan. Selain itu, produksi gas mengalami penurunan senilai 27,5% dan gas alam di yakini oleh negara Singapura dalam menciptakan listrik sebab stabilitasnya di nilai baik. Sehingga dua pengecer listrik yakni iSwitch dan Ohm Energy men-nonstopkan kinerja di negara Singapura. Kedua, krisis energi di negara Inggris diakibatkan karena supply gas naik di susul adanya perbaikan ekonomi pada pandemic Covid-19 serta musim dingin. Tetapi, supply yang banyak tidak dapat dipenuhi karena persediaan sangat terbatas sehingga AS menghentikan fasilitasnya, sampai hal ini menjadi sebab melonjaknya biaya gas alam menjadi 250% dari bulan Januari tahun 2021. Ketiga, negara China yang mengalami defisit energi sehingga membuat pemadaman sering dilakukan, dalam 1 hari pemadaman listrik bisa terjadi berap kali di 20 provinsi. Adapun 15 perusahaan yang mengalami hambatan produksi diakibatkan pemadaman listrik bergilir. Namun negara China mempunyai langkah agar bisa lebih sedikit memakasi emisi karbon pada tahun 2030 yakni mengakhiri kinerja pembangkit batu bara dengan EBT⁷.

Indonesia sebagai negara produsen energi seperti minyak dan batu bara juga rentan terkena dampak dari krisis energi global. Namun adanya kenaikan produksi dan kesiapan kapasitas cadangan nasional menjadi strategi untuk berusaha menghindari dari krisis energi yang pada tahun 2021 melanda sejumlah negara⁸. Adapun strategi pemerintah yang diterapkan Strategi Raya Energi Nasional adalah berusaha menciptakan ketahanan dan kemandirian nasional seperti mengembangkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan akuisisi lapangan minyak di luar negara untuk memenuhi kebutuhan kilang. Seperti pada tahun 2020 telah di uji coba dan substitusi produk *smooth fluid* dalam negeri memberi efisiensi yaitu US\$300.000 per sumur juga kerja sama penerbangan tahun 2019 unggul dalam menciptakan nilai sebesar Rp.25,9 miliar per tahun. Menteri ESDM Tutuka Ariadji juga

⁵ Athika Rahma.2022.Sempat Dingin, Harga Batu Bara Kembali Tembus US\$400 per metrik ton.<https://ekbis.sindownews.com/read/793341/sempat-dingin-harga-batu-bara-kembali-tembus-usd-per-ton-165476194>

⁶ Alif Karnadi.2022.Ekspor Minyak Sawit Capai US\$3,73 Milliar Hingga Februari 2022.
<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ekspor-minyak-sawit-capai-us373-miliar-hingga-februari-2022>.
Diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 10.15 am

⁷ Ni Ketut Candra Puspita.2021. Eropa Hingga Singapura, Ini Daftar Negara yang Alami Krisis Energi.
<https://www.idxchannel.com/economics/eropa-hingga-singapura-ini-daftar-negara-yang-alami-krisis-energi>.
Diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 21.16 pm

⁸ Anisatul Umah.2020. Begini Strategi Pemerintah Cegah Terjadinya Krisis Energi.CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/new/20201221161607-4-210642/begini-strategi-pemerintah-cegah-terjadinya-krisis-energi>.
Diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 01.10 pm



menyampaikan pemerintah akan berusaha mencegah krisis energi global tersebut dengan melakukan produksi minyak kemudian mengalihkan gas sebagai keperluan domestik.

Khusus pada gas, pemerintah akan melaksanakan program perkembangan jaringan pipa gas (jargas) karena pada tahun 2020 sudah ada 500 ribu rumah tangga yang terubung dengan sambungan pipa gas dengan demikian dapat mengurangi pemakaian LPG tahun 2020 yang saat itu impornya semakin melesat. Kemudian pada tahun 2021 menurut Fabby Tumiwa sebagai Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) bahwa Indonesia tidak usah ragu dan takut dan berencana menurungi dalam mengandalkan pasar energi fosil, karena adanya krisis energi pada negara Eropa, China, Inggris, India, sebab disisi lain Indonesia memiliki keunggulan untuk merencanakan transisi energi menuju dekarbonisasi lebih awal dengan baik. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak cadangan yang berlimpah dan hal tersebut adalah salah satu jalan bagi negara Indonesia untuk berpindah dari energi fosil dan untuk mencegah hal demikian maka Indonesia hanya perlu melaksanakan diverdifikasi pasokan energi dan melakukan peningkatan energi secara efisiensi⁹.

Untuk membatasi penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan tentang strategi kebijakan ekonomi politik yang di tempuh pemerintah Indonesia sebagai langkah preventif yang terjadi pada tahun 2021 khususnya pada komoditas batu bara.

METODE

Metode penelitian merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam merancang penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif dipengaruhi oleh kekuatan kata maupun kalimat yang digunakan. Basri (2014) menyimpulkan: fokus penelitian kualitatif terdapat pada proses dan pemaknaan hasil yang diperolehnya. Fokus penelitian kualitatif tertuju pada aspek manusia, objek, dan institusi, bahkan Hubungan/interaksi di antara aspek tersebut, dalam rangka mengetahui sebuah peristiwa, perilaku, dan fenomena.

Berdasarkan fokus kajian yang dijadikan topik pembahasan, jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang terpusat pada pengamatan yang mendetail. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian bisa menghasilkan pengkajian atas suatu fenomena yang lebih lengkap. Penelitian kualitatif yang memerhatikan humanism/individu dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada unsur-unsur internal individu. Aspek/unsur internal tersebut antara lain kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data terkait kebijakan ekonomi politik preventif Indonesia pada krisis energi tahun 2021 adalah studi literatur dan studi lapangan. Dimana peneliti menggunakan data sekunder sebagai bahan atau referensi dalam penelitian ini yang didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, media massa, internet, dan media lainnya. Kemudian, studi lapangan (*field research*) yang dilakukan peneliti dalam wawancara secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada individu atau kelompok sebagai narasumber yang relevan dengan

⁹ Uliyasi Simanjuntak.2021. Hindrari Krisis Energi, Indonesia Perlu Percepat Pembangunan Energi Terbarukan. <https://iesr.or.id/hindari-krisis-energi-indonesia-perlu-percepat-pembangunan-energi-terbarukan>. Diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 09.15 am

¹⁰ Wibisono., Anton. 2019. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. diakses pada tgl 21 Juni 2022, pukul 22.37 WITA



permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mencatat setiap informasi yang di peroleh dari narasumber. Jika situasi dan kondisi memungkinkan maka wawancara secara mendalam akan dilakukan secara luring namun jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam melalui via zoom (*online*) karena berhubung kondisi pandemi Covid-19 saat ini.



PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Radityo Arya Pamungkas yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang beliau peroleh pada krisis energi global yang melanda beberapa negara bahwa sebelum pemberlakuan larangan ekspor oleh pemerintah Indonesia, pemerintah menugaskan badan usaha untuk mengirim 5,1 juta ton batu bara kepada PLN namun pengelola hanya memenuhi 35 ribu ton. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara sepanjang bulan Januari 2022, lantaran produsen mineral hitam ini dianggap tak serius dalam memenuhi komitmen kebutuhan dalam negeri atau *domestic market publication* (DMO).

Pemberlakuan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga supaya hak rakyat atas batu bara tidak hilang akibat sikap-sikap seraka oleh perusahaan tambang. Pemberlakuan kebijakan ini membawa dampak positif dimana PT PLN menyatakan intervensi pemerintah soal kebijakan larangan ekspor batu bara telah memberikan dampak positif terhadap kebutuhan batu bara oleh pembangkit perusahaan negara itu. Hingga kini, PLN mendapatkan komitmen bahwa pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik. total kebutuhan batu bara untuk mencapai HoP (Harioperasi) ideal minimal 20 hari berkisar antara 16-20 juta metrik ton (MT).

Angka tersebut sesuai dengan tingkat keberhasilan pengiriman batu bara yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus Direktorat Jendral Mineral dan batu bara. PT PLN juga memastikan pasokan listrik diseluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pasokan ini dapat terus terjaga selama supply batu bara terus terpenuhi. Di wilayah Jawa, Madura dan Bali misalnya, terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 MW dari 26,9 GW menjadi 27,2 GW sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW. Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW. PLN memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik namun hal tersebut dapat diatasi selama kebutuhan batu bara tetap tercukupi.

Adapun dampak negatif dari kebijakan pelarangan ekspor batu bara yang berlaku, secara umum dan meluas ini akan memiliki dampak yang besar terhadap industri pertambangan batu bara, dan aktivitas ekspor batu bara secara khusus dimana saat ini sebagai salah satu penghasil devisa bagi negara di samping itu dampak lain dari kebijakan larangan ekspor batu bara ini di antaranya adalah volume produksi batu bara nasional akan terganggu, pemerintah akan kehilangan devisa dari hasil ekspor batu bara, pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak, penghasilan produsen batu bara akan terganggu karena tidak dapat mengekspor batu bara.

Terkait larangan ekspor batu bara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah mencari solusi untuk mengatasi masalah pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. APBI menilai larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha untuk bulan Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidak tepat. Pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada dibawah manajemen operasi PLN maupun IPP (*Independent Power Producer*) sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara dari masing-masing perusahaan pemasok. APBI berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% tahun 2021.

Para produsen batu bara mendukung keputusan menteri ESDM sebelumnya yang melarang penjualan batu bara ke luar negeri sampai dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai presentasi penjual atau kontrak penjualan. APBI pun berharap agar pemerintah fokus pada upaya solusi



permanen permasalahan struktural pasokan batu bara domestik. Beberapa solusi yang ditawarkan APBI untuk jangka pendek dan jangan menengah dinataranya, perlu adanya tindakan tegas kepada pemasok yang wanprestasi, perlu mekanisme pemantauan pemenuhan DMO secara berkala, besaran presentasi DMO perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang akurat, DMO untuk perusahaan yang melebihi kewajibannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dan harga batu bara sebaiknya mengikuti harga pasar yang telah ditentukan.

Selain itu APBI pun merekomendasikan bagi PLN, agar lenih fleksibel untuk mengambil batu bara diluar kualitas yang dibutuhkan saat ini, dengan cara *blending*, perhitungan batu bara dibuat secara akurat, tepat dengan memperhatikan safety stock memenuhi komitmen yang seperti yang tertuang dalam kontrak (volume dan tata waktu pengiriman), rekomendasi kebijakan untuk jangka menengah, dan dalam hal terjadi kelangkaan pasokan, pihak PLN dapat mengambil batu bara dari bagian pemerintah apabila di izinkan.

Kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada awal Januari tahun 2022 tidak berlangsung lama sehingga larangan ekspor batu bara kembali di buka pada bulan Februari tahun 2021. Dimana kementerian ESDM mencabut sanksi pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri terutama atas 17 kapal bermuatan batu bara dari pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi yang telah memenuhi DMO (Domestic Market Obligation) tahun 2021 senilai 100% atau lebih. Adapun 17 belas kapal tersebut yakni: MV. CMB Van Dijk, MV. Neng Yuan, MV. Santarli, MV. Maizuru Kichijo, MV. Great Ocean, MV. AC. Shanghai, MV. Vidyut, MV. Pantelis, MV. Jie Li, TB. Kingfisher 501, MV. Mei Hua Hai, MV. Corona Kingdom, MV. Pacific Pride, MV. Pavo Bright, MV. Princess Doris, MV. Eternal Resorce, MV. Sea Voyager, MV. Star Mona

Kebijakan larangan ekspor batu bara ini diprediksi akan berdampak ke empat negara sahabat diantaranya China, India, Jepang dan Korea Selatan sementara Indonesia adalah adalah negara pengekspor terbesar batu bara dengan memperdagangkan sebanyak 40% pasokan batu bara di dunia dan pada tahun 2020 negara Indonesia mengirim 400 juta ton ke beberapa negara. Namun diketahui dampak dari larangan ekspor batu bara sementara yang diterapkan Indonesia ini akan membuat pasokan 30 juta ton batu bara di dunia akan terganggu.

Beberapa negara melayangkan protes akibat kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan oleh Prsdien Joko Widodo, karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir batu bara terbesar di dunia, maka dari itu efek kebijakan larangan ekspor batu bara ini akan merugikan negara lain. Sehingga ketiga negara ini memprotes kebijakan larangan ekspor yang di terapkan Presiden Jokowi, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Jepang, Surat kedutaan Besar Jepang tiba di Jakarta kepada Menteri ESDM menyampaikan bahwa sedikitnya lima kapal bermuatan batu bara tujuan Jepang sudah menunggu untuk berangkat dari perairan Indonesia tapi tidak bisa dilaksanakan akibat tidak mendapat izin ekspor. Dimana Jepang sudah mengimpor sekitar 2 juta ton batu bara dari Indonesia per bulan untuk pembangkit listrik dan manufaktur. Korea Selatan, Menteri Perdagangan Negeri Ginseng Yeo Han-koo mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi. Dimana dalam pertemuan itu disampaikan atas keprihatinan pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dicabut. Sehingga pada pertembuat itu menteri perdagangan Indonesia menyampaikan bahwa akan mengupayakan agar secepatnya ekspor batu bara dibuka kembali. Dalam pertemuan darurat pun kedua menteri sepakat mengatakan bahwa sangat penting dilakukannya kerja sama dalam jaringan



pasokan global dan menekankan wajibnya usaha bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil. Filipina, Surat yang dikirimkan Departemen Luar Negeri kepada Menteri ESDM Indonesia yang berisi permintaan Alfonso Cusi (Menteri Energi Filipina) untuk mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terkait dengan batu bara. Permintaan ini dilakukan agar tidak merugikan ekonomi negara manapun khususnya yang bergantung pada bahan bakar pembangkit listrik.

Pertumbuhan ekonomi dunia menuntut ketersediaan energi yang mampu menopang kehidupan berskala global. Inti permasalahan energi global adalah ketidakseimbangan permintaan dan ketersediaan serta akses terhadap sumber daya energi (SDE). Berbagai faktor yang menciptakan ketidakseimbangan permintaan antara lain penambahan jumlah penduduk dan masifnya pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi di dunia berimplikasi terhadap munculnya dampak negatif dan positif. Dampak positif dari krisis energi ini adalah munculnya motivasi untuk pengembangan sumber EBT, sedangkan dampak negatif dari krisis energi ini adalah munculnya perebutan akan sumber-sumber baru. Kedua dampak tersebut disinyalir mendorong terjadinya upaya pergeseran pengaruh yang dilakukan oleh berbagai negara dalam rangka pemenuhan energi, sehingga hal inilah yang dinilai menjadi potensi ancaman bagi Indonesia.

4.2 Kebijakan Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raditiyo Harya Pamungkas, S.T., M.Sc dari bidang kebijakan fiskal sebagai ahli muda analisis kebijakan ekonomi makro bahwa langkah preventif Indonesia dalam mencegah terjadinya krisis energi adalah dengan melakukan hilirisasi minyak kelapa sawit. Dimana hilirisasi ini merupakan strategi dalam meningkatkan nilai tambah bahan baku bumi. Dengan endorment, ke depan barang-barang yang diekspor tidak lagi berupa bahan mentah tetapi merupakan barang setengah jadi atau sudah siap di pakai. Proses hilir merupakan proses pendekatan antara hasil penelitian dan pemindahan kepada pengguna. Pengguna dalam hal ini ialah komunitas atau masyarakat dan masyarakat dapat menjadi organisasi pemerintah ataupun industri.

Kementerian perindustrian terus mendorong struktur industri manufaktur melalui kebijakan hilirisasi berdasarkan fundamental yang bermanfaat agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian, meningkatkan investasi dalam negeri, membuka peluang bagi tenaga kerja, serta memperluas lapangan pekerjaan. Melalui sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi yang sangat luas untuk menjadi negara eksportir berbagai produk berbasis agro, mineral, migas, dan batu bara. Contohnya pada sektor industri agro, Indonesia berhasil menciptakan hilirisasi minyak sawit (CPO) karena dalam masa 10 tahun ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat dari 20% pada tahun 2010 ke 80% di tahun 2020.

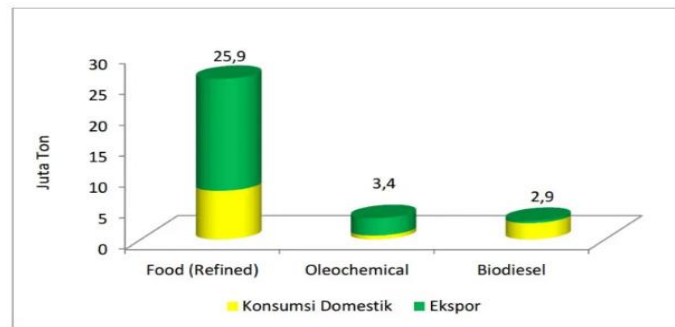
Kelapa sawit adalah bagian dari salah satu produk dari perkebunan yang berperan penting untuk perekonomian Indonesia, juga produk yang menghasilkan uang paling banyak serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang relatif besar dan luas, seperti menyerap lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan bagi orang, mengembangkan daerah, dan bisa berkontribusi sebagai potensi dalam pendapatan pemerintah daerah dan pusat. Terkait kebijakan industri kelapa sawit, pemerintah Indonesia mendahulukan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memberikan kesempatan dalam menjangkau pembangunan yang setara dan inklusif baik jiwa maupun dalam menjaga lingkungan.

Industri kelapa sawit memang sudah sangat strategis dalam pasar domestik dan global, karena memiliki peluang besar dalam memenuhi peran sebagai penggerak perekonomian nasional. Pada tahun 2008 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang 55% dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO), namun pada tahun 2016 ekspor minyak kelapa sawit menyumbang 78% dan sudah merupakan minyak sawit yang sudah di



olah. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini bahwa kemajuan hilirisasi minyak kelapa sawit di Indonesia sudah terjadi sebelumnya.

Gambar 1 4 Kemajuan Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit tahun 2016



Sumber ; Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

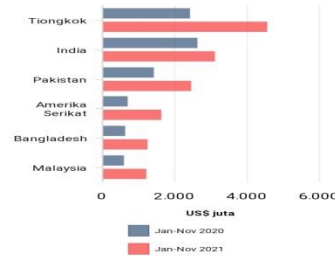
Gambar di atas menjelaskan bahwa tahun 2016 produksi olein (RBD olein, minyak goreng, margarin, dan lainnya) sebesar 25,9 juta ton, produksi olekimia (sabun, detergen, dan lainnya) sebesar 3,4 juta ton, serta biodiesel (transportasi, pembangkit listrik dan mesin pemanas lainnya) sebesar 2,9 juta ton. Dengan berhasilnya hilirisasi minyak sawit tahun 2016 di dalam negeri maka secara otomatis telah memperbaiki kualitas ekspor minyak sawit Indonesia yang awalnya minyak sawit mentah akhirnya di dominasi dengan minyak sawit olahan.

Setelah Indonesia berhasil menjadi produsen CPO terbesar dunia pada tahun 2006, tantangan berikut yang dihadapi Indonesia adalah merubah Indonesia dari “raja” CPO dunia menjadi “raja” produk hilir minyak sawit dunia seperti produk oleofood, produk oleokimia dan biofuel. Bertahan sebagai raja CPO dunia akan sangat merugikan Indonesia terutama dalam waktu yang lama. Dengan selalu mengandalkan pasar CPO dunia akan membuat industri minyak sawit Indonesia mudah dipertandingkan pasar CPO dunia karena industri hilir juga tidak dinikmati oleh Indonesia. Maka sejak tahun 2011 Indonesia sudah menetapkan kebijakan hilirisasi minyak sawit sebagai langkah yang tepat.

Strategi hilirisasi minyak sawit dalam negeri merupakan perpaduan strategi promosi ekspor dengan substitusi impor. Artinya melalui hilirisasi domestik Indonesia mengolah CPO menjadi produk bernilai tambah lebih besar baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pengganti produk yang di impor seperti solar, avtur, premium, plastik, pelumas, dan lainnya.¹¹ Sehingga industri minyak sawit juga menjadi peran penting dan strategis sebagai pendorong ekonomi kerakyatan serta dapat menyerap banyak tenaga kerja. Adapun gambar tujuan ekspor minyak sawit tahun 2020-2021:

¹¹ Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.2020. Kemajuan Hilirisasi Minyak Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/2476/kemajuan-hilirisasi-minyak-sawit-indonesia>. Diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 16.25 am

Gambar 1 6 Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia Terbesar (Januari-November 2021)

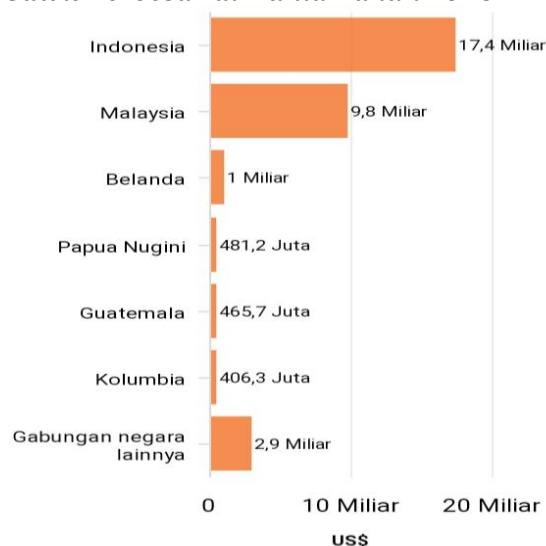


Sumber ; Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari gambar di atas negara Tiongkok dan India menjadi negara tujuan ekspor minyak sawit nasional tertinggi. Ekspor CPO kedua mencapai 29% dari total nilai ekspor sawit Indonesia dan nilai ekspor CPO ke negeri Tirai Bambu sebesar US\$ 4,55 miliar dari bulan Januari-November tahun 2021 sehingga total nilai ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 17,47%. Negara tujuan ekspor kedua adalah India yakni sebesar US\$ 3,11 miliar (11,96%). Diikuti negara Pakistan yaitu sebesar 2,46 miliar, Amerika Serikat US\$1,61 miliar (9,44%), Bangladesh US\$ 1,26 miliar (4,83%), dan Malaysia sebesar US\$ 1,21 miliar (4,65%).

Pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia dengan total nilai ekspor sebesar US\$17,36 miliar, berikut catatan nilai ekspor kelapa sawit :

Gambar 1 2 Nilai Negara Eksportir Kelapa Sawit Terbesar di Dunia Tahun 2020



Sumber; Kementerian Pertanian

Angka yang dicapai Indonesia merupakan kontribusi sebesar 53,46% dari jumlah keseluruhan nilai ekspor kelapa sawit global yakni US\$ 32,48 miliar pada tahun 2020. Adapun negara Malaysia berada di bawah Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US\$ 9,78 miliar atau 30,12% dari total nilai ekspor global, berikutnya ada negara Belanda yang hanya mencapai angka di US\$1,04 miliar setara dengan 3,2%, kemudian ada Papua Nugini sebesar US\$481,1 juta yakni 1,48% serta Guatemala sebesar US\$465,7 juta yakni 1,43%, terakhir ada Kolumbia sebesar US\$406,3 ribu setara dengan 1,25%. Dari kedua gambar



diatas minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia merupakan salah satu komoditas ekspor yang unggul dalam bidang perkebunan. Yang mana kegiatan ekspor ini menjadi keuntungan bagi negara Indonesia dengan menghasilkan devisa yang penting bagi industri juga memberikan kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama analisis muda dalam bidang kebijakan fiskal (kebijakan ekonomi makro) bahwa hirilisasi menjadi salah satu strategi preventif yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, juga meningkatkan peluang usaha dalam negeri. Karena dengan melakukan hirilisasi, pada masa mendatang komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, namun berupa barang setengah jadi atau barang yang sudah siap di pakai. Maka dengan menjual atau mengekspor barang dalam bentuk stengah jadi ataupun yang siap pakai secara otomatis akan menambah nilai jual terutama bagi Indonesia. Selain itu, adanya peningkatan ekonomi terkait hirilisasi industri maka pengaruh bagi semua pihak juga menghasilkan dampak yang positif seperti masyarakat, pelaku usaha, investor, serta negara. Oleh karena itu, banyaknya investor yang berinvestasi di Indonesia maka tentunya akan membuat potensi hirilisasi industri di Indonesia semakin kuat.

Ketergantungan dunia akan sumber energi belum dapat dihilangkan sementara cadangan dan produksinya mengalami penurunan. Krisis energi dapat membawa pengaruh yang besar terhadap negara-negara besar di dunia. Ketersediaan energi global secara berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian dunia. Kebutuhan energi secara dominan dipengaruhi oleh ketergantungan konsumsi energi sehingga cadangan terus menurun. Kebutuhan energi akan terus bertambah selaras dengan pertumbuhan populasi dan tuntutan kesejahteraan hidup. Pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan industrialisasi menyerap dua kali konsumsi energi listrik pada tahun 2030. Situasi ini menuntut dunia akan membutuhkan ketersediaan energi yang sangat besar pada 8 tahun kedepan khususnya energi listrik yang bersih.

Teknologi merupakan faktor penentu dalam memperoleh sumber energi di dunia. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan teknologi menunjukkan peranan dan kemampuan dalam sistem energi global. penerapan teknologi turut memperkuat peran kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan energi terkait keamanan energi, biaya dan dampak lingkungan yang berhubungan dengan energi. pengolahan sumber daya energi sangat tinggi nilainya karena memerlukan teknologi. Teknologi penyediaan energi umumnya disisi penyediaan masih diimpor dari luar negeri dan belum sepenuhnya dikuasai industri dalam negeri.

4.3 Market Operation

Market Operation merupakan salah satu strategi Indonesia dalam memenuhi baham pangan bagi masyarakat dimana pemerintah akan berusaha menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin kebutuhan masyarakat. pemerintah melakukan banyak program dalam menjaga stabilitas harga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan salah satunya menerapkan operasi pasar. Eksploitasi pasar dilakukan untuk mengatasi adanya peningkatan harga pada suatu komoditas yang dilakukan dengan cara menekan harga, agar bisa menambah pasokan melalui pedagang swasta, perusahaan publik atau langsung ke pedagang eceran dengan harga yang lebih rendah.

Pemerintah akan menyikapi krisis energi apabila mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi namun belum ada harga yang melambung tinggi kecuali minyak goreng, seperti pertalite, pertamax, solar, listrik, gas subsidi, bahkan non subsidi tidak ada yang naik di negara Indonesia. Hal itu terjadi karena pemerintah hadir bersama APBN untuk



memilah-milah mana yang harus didahulukan sehingga pemerintah menyerap resiko agar masyarakat masih bisa menjangkau harga energi. Karena ketika pemerintah menaikkan harga secara otomatis tidak dapat dijangkau dan mengganggu ekonomi masyarakat yang rentan.

Dimana pada saat Covid-19 mulai pulih harga mulai naik pada komoditas minyak, dan itu menyebabkan harga menjadi naik dan sulit untuk dijangkau masyarakat namun pemerintah Indonesia kembali hadir bersama instrumen APBN untuk menyerap sedikit resiko agar masyarakat masih bisa mengakses energi atau beraktivitas. Berbeda dengan negara Argentina dan Meksiko yang sudah merasakan kenaikan harga cukup tinggi pada komoditas batu bara berbahan pembangkit listrik, sehingga dari negara ini melakukan pemadaman listrik bergilir. Demikian harga pada internasional namun Indonesia masih relative rendah dengan harga yang normal kecuali minyak.

Sementara naiknya harga pada minyak karena adanya perang antara Rusia-Ukraina yang mana menjadi salah satu negara yang memiliki potensi gas yang cukup besar, sehingga apabila Rusia tidak memproduksi gas secara otomatis harganya akan naik artinya Rusia salah satu negara juga yang mempunyai kekuatan dalam menggerakkan negara. Pada tanggal 13 Januari 2022 menteri koodinator bidang perekonomian Indonesia tetap pada pendiriannya dengan malakukan langkah antisipasi guna menantikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga bahan pangan agar tetap bisa terjangkau oleh masyarakat.

Maka strategi pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan harga stabil sehingga masih dapat dijangkau oleh masyarakat seperti mengadakan operasi pasar, melakukan bantuan sosial (uang tunai dan bahan pangan), memperkuat produksi (menjaga penen dan memberikan pupuk yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik dan harganya terjamin akan naik), melakukan komunikasi yang efektif.

Pada saat CPO dunia menjadi tinggi, pemerintah berupaya agar tetap bisa menjamin stabilitas harga minyak goreng sebagai prioritas utama bagi kebutuhan masyarakat karena dengan melakukan operasi pasar harga akan tetap terkendali. Dimana pada 28 Desember tahun 2021, secara nasional biaya untuk bahan pangan mengalami peningkatan, mulai dari harga minyak goreng sebesar Rp. 20.350-, per kg, telur ayam ras Rp.29.500-, per kg dan cabai rawit merah Rp.96.400-, per kg. Agar peran pemerintah berfungsi, maka pemerintah menerapkan strategi untuk mengurangi sedikit beban dari masyarakat.

Melakukan operasi pasar salah satu apresiasi untuk pemerintah untuk membantu masyarakat menjamin kebutuhan sembakonya. Selain harga pangan, adanya peningkatan pada harga pupuk juga akan menjadi perhatian pemerintah agar bisa meninjau dan menjamin penyediaan pupuk bagi petani dengan begitu pemerintah mengetahui apa yang menjadi kendala, tantangan serta situasi yang dialami para pedagang.

Namun Indonesia beruntung karena perekonomiannya tidak terlalu mengandalkan pada produk migas bumi maupun batubara, akan tetapi Indonesia harus segera menerapkan langkah atau strategi untuk mencegah negara dari krisis energi global yang terjadi pada tahun 2021¹². Yang mana sektor industri ini bisa menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional bahkan mampu menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang karena keterkaitan ekonomi serta

¹² Nirartha Simadhi.2016.Indonesia dan Krisis Energi Akut.Jakarta.<https://wri-indonesia-dan-krisis-energi-akut>. Diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 23.45 pm



kedalaman struktur yang kuat serta mempunyai daya saing yang mampu bertahan lama di pasar internasional¹³.

Selain itu, menargetkan kebijakan industri pada sektor dimana negara memiliki sumber daya yang melimpah sementara Indonesia sendiri memiliki dua sumber daya tersebut dengan kaya akan sumber daya alam dan kaya akan sumber daya manusia. Dalam kebijakan industri ini Indonesia harus mampu mempertahankan 7% atau lebih tingkat pertumbuhan setiap tahun selama 20 tahun dan menjadi negara yang berprestasi tinggi demi meningkatkan diversifikasi industri negara¹⁴.

Isu krisis energi yang melanda sejumlah negara belum berdampak di Indonesia, sebab produksi sumber energi seperti minyak, gas dan batubara yang melimpah dimiliki Indonesia. Sehingga hal demikian membuat harga listrik pada negara Indonesia tidak mengalami kenaikan, sementara pada negara lain mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Adanya situasi ini mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan output, selain harus memenuhi produksi dalam negeri, negara juga harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar luar negeri. Ketahanan energi nasional Indonesia masih terbilang aman, bahkan dalam isu krisis energi ini Indonesia diuntungkan yang mana Indonesia masih mengekspor 70% pasokan batubara dan 38% pasokan gas domestik.

Adapun ketahanan energi Indonesia berada pada angka 6,57 sehingga dapat dikatakan masuk dalam kategori aman. Walaupun kondisi Indonesia terbilang aman bahkan menguntungkan, namun Indonesia tetap harus berjaga-jaga dalam mengimpor bahan bakar fosil, terutama pada komoditas minyak. Karena jika tidak, Indonesia akan mengalami kegoyangan pada subsidi bahan bakar, misalnya terganggunya dalam mengimpor minyak maka Pertamina akan meminta subsidi dan hal itu akan menjadi beban bagi negara. Akan tetapi keadaan batubara dan gas yang tinggi, Indonesia masih dapat mengekspor hingga memberi keuntungan bagi negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagai negara berkembang Indonesia perlu mengelola sumber energi dengan baik agar mampu bersaing secara dengan melalukan dua langkah preventif seperti menegaskan agar produk dihirilisasi agar mendapat harga dari produk Indonesia dan bisa menambah penerimaan negara mengadakan operasi pasar agar tetap bisa dijangkau masyarakat.

¹³ Mari mencatat.2021. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasional. Jakarta. <https://www.marimencatat.com/2021/12/kebijakan-dan-strategi-pengembangan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 18.34 pm

¹⁴ Sony.2020. Stabilitas Ekonomi dan Politik Sangat Penting Agar Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Dapat Berhasil. Jakarta. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3107-stabilitas-ekonomi-dan-politik-sangat-penting-agar-kebijakan-industrialisasi-di-indonesia-dapat-berhasil>. Diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 23.12 pm



PENUTUP

Peran energi sebagai bahan dasar yang penting dan strategi untuk kelangsungan hidup dan pembangunan manusia telah mengikuti sejarah peradaban umat manusia, dimana energi berfungsi sebagai alat dorong utama dalam proses transformasi dari peradaban agraris menuju kepada peradaban industri. Energi juga tidak dapat dipisahkan dari setiap langkah signifikan pencapaian kemajuan peradaban manusia serta sistem perekonomian dunia. Sebagaimana yang diketahui bahwa keperluan energi akan terus meningkat sehingga negara belum bisa mengurangi ketergantungannya terhadap energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, serta batubara dalam melakukan aktivitasnya.

Pengelolaan energi harus dilakukan secara optimal guna dalam memenuhi ketersediaan energi. Dalam UU No.30 Tahun 2007, krisis energi merupakan situasi kurangnya energi sehingga mengakibatkan terhambatnya peran pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, serta kegiatan perekonomian. Maka dari itu Presiden membentuk DEN (Dewan Energi Nasional), guna untuk membuat konsep tentang kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi.

Terjadi krisis energi 2021 yang melanda beberapa negara, namun Presiden Joko Widodo tetap optimis karena Indonesia mampu mengambil kesempatan. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam maka Indonesia mampu berperan dengan sumber daya yang dimiliki, salahnya satu batu bara. Yang mana banyaknya cadangan batubara Indonesia, sehingga pada saat bulan April tahun 2022 Badan Pusat Statistik mencatat data bahwa ada pertumbuhan ekspor pesat terutama disektor pertambangan. Selain itu lonjakan harga komoditas, terutama komoditas batubara yang naik 238,8% ke US\$302 per ton pada bulan April.

Namun tetap saja Indonesia perlu menyiapkan strategi atau langkah dengan melakukan hirilisasi minyak kelapa sawit. Dalam hal ini Indonesia menggunakan komoditas minyak kelapa sawit sebagai langkah preventif dalam menentukan kebijakan ekonomi politiknya. Karena dengan melakukan hirilisasi, pada masa mendatang komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, namun berupa barang setengah jadi atau barang yang sudah siap di pakai. Maka dengan menjual atau mengekspor barang dalam bentuk setengah jadi ataupun yang siap pakai secara otomatis akan menambah nilai jual terutama bagi Indonesia.

Selain itu, adanya peningkatan ekonomi terkait hirilisasi industri maka pengaruh bagi semua pihak juga menghasilkan dampak yang positif seperti masyarakat, pelaku usaha, investor, serta negara dan menghasilkan lingkungan bisnis industri yang dapat menguntungkan, dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan agar kegiatan investasi bisa terus berkembang dan mengalami peningkatan hingga menguatkan ekonomi suatu negara.

Indonesia sudah menjadi sebagian kecil dari masyarakat ekonomi internasional, karena apa yang terjadi pada internasional akan berdampak pada ekonomi domestik Indonesia, contohnya ekspor impor yang dilakukan Indonesia, yang secara otomatis akan berdampak pada Indonesia sebab Indonesia di kenal sebagai negara yang ekonominya terbuka akan terlihat berbeda dengan negara lain seperti Korea Utara yang sangat tertutup yang hanya memprioritaskan barang-barang untuk negaranya sendiri. Contoh kecilnya saja roti yang bahan dasarnya gandum sedangkan Indonesia tidak bisa menanam gandum jadi otomatis Indonesia akan melakukan impor.

Salah satu contoh dinamika global khususnya ekonomi internasional yang mempengaruhi negara Indonesia juga transaksi keluar negeri, dan pasar global, jadi ini yang



membuat Indonesia juga masuk sebagai kategori masyarakat internasional antara lain nilai tukar rupiah, suku bunga, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang menyebabkan dinamika global terkait ekonomi global berdampak pada Indonesia karena adanya jalur perdagangan dan jalur sektor keuangan.



REFERENSI

- Adhiem, M.A. (2021). *Pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta. Publica Indonesia Utama.
- Agung Risdhianto M.D.A. (2015). *Dampak Krisis Energi Terhadap Kedaulatan NKRI*. Bandung. Rumah Buku
- Ahmad, T., Nugroho, A. S., Abdullah, R., & Sumarto, A. H. (2020). *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi*. Jakarta. INDEF
- Azhar, M., (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 398-412.
- Badaruddin, M. (2018). *Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
- Chadhiq, U. (2009). Implementasi Strategi Blue Ocean untuk Mencapai Kinerja Perusahaan yang Kompetitif. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(7).
- Helmi, A. (2021). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Meningkatkan Kinerja Widyaiswara. *jurnal aparatur*, 5(2), 119-136.
- Hidayati, I. N., & Suryanto, S. (2015). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16(1), 42-52.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Avatara*, 4(3).
- Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global Vol. 17 No. 3 (2020)
- Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). *Tatanan Global Pada Pembangunan dan Ekonomi Politik Internasional Selama dan Pasca Pandemi Covid-19*. Jakarta. Universitas Pembangunan Nasional
- Jurnal Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis Vol. 3, No. 1, September 2021, pp. 1 – 14
- Jurnal wilayah dan lingkungan P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751 Volume 6 Nomor 1, April 2018, PP 58-7
- Kamesworo, S. *Analisis Strategi Pengembangan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian*. Jawa Barat. (Doctoral dissertation, IPB University)
- Karl Max dan Federick Engels. (2009). *Membongkar Akar Krisis Global*. Yogyakarta. Resist Book
- Karya Indonesia. KINA. (2008). *Peranan Industri Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta. Kemenprin



- Kurniawati, L. (2017). Kebijakan Dana Ketahanan Energi Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional: Konsep Dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 29-41.
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *POLITIKA*, 10(2), 2.
- Luqman, Y., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Tambunan, A. H. (2017). Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 134-145.
- Masloman, I. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Sektor Yang Potensial Dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Nasional, D. E. (2020). *Bauran Energi Nasional 2020*. Jakarta. Sekretariat Jenderal DEN.
- Prakoso, A. (2015). *Dinamika Ekonomi Politik dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional di Sektor Migas: Studi Kasus Blok Mahakam*. Jakarta. (Doctoral dissertation, Bakrie University).
- Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan di Indonesia. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 1-14.
- Prof. Dr. Boediono (2016). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Mizan.
- Putra, R. A. (2010) *Kerjasama Pemerintah Rusia dan China Dalam Menguasai Energi di asia Tengah*. Riau. Perpustakaan Universitas Riau
- Putri, F. D. E. (2014). Krisis Minyak Tahun 1973-1974 di Negara-negara Industri sebagai Penggerak Tata Ekonomi Dunia Baru. *AVATARA, Journal Pendidikan Sejarah*, 2, 42-57.
- Ramadani, T. (2020). Komunikasi Organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 119-134.
- Ramadani, T. (2020). Strategi Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada Outlook Energi Indonesia 2019 [Communication Strategy of the Secretariat General of the National Energy Council in the Indonesia Energy Outlook 2019]. *Jurnal Inspirasi*, 11(1), 59-68.
- Rini, A. (2016). Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Sumatera Barat. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Saliem, H. P., & Suryani, E. (2016). Dampak Krisis Pangan-Energi-Finansial (PEF) Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 28, No. 2, pp. 107-121).
- Siburian, R. (2016). Pertambangan batu bara: Antara Mendulang Rupiah dan Menebar Potensi Konflik. *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 69-92.



- Sugeng Mujiyanto. (2019). Indonesia Energy out look 2019. *J. Chem. Inf. Model*, 53(9), 1689-1699.
- Sukarji, A. Strategi Implementasi Kebijakan Pembelajaran Elektronik (E-Learning) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(3).
- Sulistiatanie, I. (2018). Pengaruh Krisis Energi Global Terhadap Eksistensi PT. Pertamina Sebagai Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Bandung. (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Pasudan).
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *CIVIS*, 1(2).
- Yuniati, D., Priyanto, S., & Subagyo, S. (2019). Analisis Pengembangan Terminal Kargo Bandar Udara Juanda Guna Mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas). *Warta Ardhia*, 44(2), 137-144.
- Zulkarnain, S. I. P. (2016). Penelitian Stimulus:" Kebijakan Pengembangan energi Alternatif yang Ramah Lingkungan Dalam Mengatasi Krisis Energi Dalam Perspektif Hubungan Internasional". Jakarta. Universitas Nasional